

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI MALUKU - TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan di Provinsi Maluku yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dukcapil Provinsi Maluku 2019- 2024.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku telah mempunyai panduan, pedoman dan acuan tentang arah kebijakan pembangunan kedepan yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merumuskan visi, misi, tujuan, arah kebijakan strategi dan sasaran kinerja.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini diucapkan terima kasih, dan semoga R Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku.

Ambon, Maret 2023



PLT. KEPALA DINAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dra. Dewi Andayani Pattimahu
Pembina Tk.I
No. 4963/427 199203 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstara PD	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	II-15
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	II-28
2.4. Review Usulan Program dan Kegiatan PD	II-30
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	II-54
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja PD	III-1
3.2. Program dan Kegiatan	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	IV-1
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan rancangan RENJA perangkat daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/ Lintas perangkat daerah. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran- sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah dengan memperhatikan kesepakatan pada hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 23)
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66)
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019- 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja yang dimulai pada tahun 2023 adalah Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku yang memuat urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program/ kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Disdukcapil Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tujuan :

1. Sebagai acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku dalam menjabarkan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
2. Merumuskan arah pembangunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku pada Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Usulan Program dan Kegiatan PD, berisikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Program dan Kegiatan, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

4.2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB V PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis PD

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Sinkronisasi terhadap sasaran strategis serta indikator kinerja antara dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024 telah diupayakan konsisten satu sama lainnya.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Rencana Kerja Tahun 2024 Sipil Provinsi Maluku selama Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2023.
II-10

Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022, secara fisik terlaksana sebesar 100 %, dan realisasi keuangan sebesar 95,67%. Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2022 yang telah dituangkan dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2022.

Tabel T-C 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
PROVINSI MALUKU**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil dan Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi Target Rencana Strategis (%)		
-1	-2	-3		-4	-5	-6			-7	-8			
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
X.XX	PENUNJANG URUSAN												
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Program Tercapai	Persen		6.031.725.167	100	94,86	90					
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan	Dokumen		107.498.392								

	Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja SKPD												
X.XX.01.1.01	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah (Renstra, Renja, PK dan IKU)	Dokumen			55.514.960	4	4	100		4		100	
X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran (RKA, RKA Pergeseran)	Dokumen			24.681.632	1	1	100		2		100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			4.400.900	1	1	100		1			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA_SKPD	Dokumen			6.958.700	1	1	100		1			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA_SKPD	Dokumen			5.611.900	1	1	100		1			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan (Forum Perangkat Daerah/Dukcapil)	Laporan			10.330.300	5	5	100		5		100	
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Keuangan dan Aset				3.711.463.876								

X.XX.01.1.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Dukcapil yang dibayarkan 1 tahun	orang			3.608.491.224	32	32	100		29		100	
X.XX.01.1.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan			97.645.902	1	1	100		1			
X.XX.01.1.02 .07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan			5.326.750	2	2	100		2		100	
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					230.883.960								
X.XX.01.1.05 .11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			135.577.760	500	500	100					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah AASN Yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			95.306.200	35	26	74,3		35			
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrsasi Umum Perkantoran				752.811.911								
X.XX.01.1.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor yang disediakan	Paket			49.518.844	3	3	100		3			
		Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu												
		Alat tulis yang disediakan												
X.XX.01.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Bahan			11.702.700	14.545	11.103	80					

X.XX.01.1.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen				2.660.000	600	532	88,7				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan				18.387.000	492	308	60				
X.XX.01.1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Laporan				670.543.367	280	279	99,98				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan kebutuhan barang milik daerah					651.520.000							
X.XX.01.1.07 .05	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit				395.400.000	3	3	100				
X.XX.01.1.09 .10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Instalasi jaringan yang dipelihara (Listrik, Telp/Internet, Air)	Unit				17.300.000	21	21	100				100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
02.12.04	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													

1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan				477.239.771							
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang didistribusikan	surat			2.000.000	201	201	100				100
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Laporan			94.391.771	12	12	100				100
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan	Orang			380.848.000	1	1	100				
		Sopir	Orang				2	2	100				100
		Administrasi Umum	Orang				9	9	100				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100.307.257							
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	unit			57.377.371	1	1	100				100
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit			25.629.886	1	1	100				100
2.12.04.1.0	Pelayanan Pendaftaran Penduduk					119.045.100							
2.12..1.	Pendataan Penduduk Non Parmenen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana ruang server	Dokumen			119.045.100	24	24	100				
.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan					104.254.000							
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan			104.254.000	20	20	100				

ku

02.12.05	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					189.941.600							
2.12.05.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil					109.150.600							
2.12.05.1.01.01	Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting	Dokumen			109.150.600	21	21	100				
	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					80.791.000							
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Laporan			80.791.000	12	8	66,7				
02.12.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					388.203.237							
2.12.02.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					115.604.458							
2.12.02.1.01.02	Penyusunan Tata cara Pengendalian Data Kependudukan yang bersifat Data Perorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kab/Kota		Dokumen			115.604.458	2	2	100				
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					127.240.814							

2.12.02.1.02.01	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen			127.240.814	14	8	57,1					
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					145.357.965								
2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Laporan			145.357.965	20	20	100					
02.12.03	PROGRAM PENGELOOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					131.775.880								
2.12.03.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan					131.775.880								
2.12.03.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan	Jumlah Buku Data Kependudukan	Dokumen			21.685.000	80	80	100					
2.12.03.1.01.05	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen			110.090.880	40	40	100					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													
2.12.03.1.02	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					83.161.550								

2.12.03.1.02.0 1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	dokumen			83.161.550	1	1	100					
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA														
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					300.794.860								
2.12.03.1.03.0 1	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Dokumen			300.794.860	1	1	100					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas ditetapkan beberapa indikator yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah:

7.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana Kerja tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian pada tahun 2024 menurut tujuan dan sasaran yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	
1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	0,90
2	Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran	0,89
3	Rasio Pasangan ber-Akte Nikah	100
4	Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Provinsi	Ada
5	Cakupan Penerbitan KTP	90
6	Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) Usia 15 - 49 Tahun	
7	CPR (Prevelensi Pemakaian Alat Kontrasepsi)	
8	Persentase Partisipasi Kab/Kota dalam Pembangunan berbasis Keluarga di Provinsi Maluku	100
9	Persentas Program yang Tercapai	100

7.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Maluku tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah

NO	Indikator	Target
1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	
2	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	100
3	Rasio Pasangan ber-Akte Nikah	100
4	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3
5	Status Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada
6	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	
7	Total Fertility Rate (TFR)	

TABEL T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI MALUKU

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah					Realisasi capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)
1	Rasio Penduduk ber-KTP			0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,91	0,78	0,94	-	-			-
2	Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun			0,80	0,85	0,90	0,87	0,89	0,82	0,73	0,82	-	-			-
3	Rasio Pasangan ber- Akte Nikah			0,20	0,25	0,35	1	1	0,30	0,24	1					-
4	Ketersediaan Data Kependudukan Skala Provinsi			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	-		-
5	TFR			2,93	2,91	2,89	2,87	2,84	3,16	2,91	2,52					
6	CPR			45,42	45,70	45,99	46,77	46,63	36,6	33,7	34,72					

2.2. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telah teridentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan singel Identity number dan pemanfaatan data kependudukan.
2. Masih rendahnya inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
3. Belum maksimalnya fasilitasi penyediaan jaringan tertutup dan pembuatan aplikasi untuk OPD dan Lembaga Pengguna lainnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Belum maksimal terlaksananya perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan instansi pengguna tingkat provinsi.
5. Belum tersajinya Profil Kependudukan Kab/Kota tepat waktu sesuai dengan substansi Pedoman Penyusunan

Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam penyajian data secara elektronik untuk mendukung Dukcapil Go-Digital, Dalam rangka sinergitas dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kependudukan dan pencatatan sipil antara provinsi dengan kabupaten/kota maupun Kementerian/Lembaga telah dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan konsultasi secara berkala untuk mencapai tujuan pembangunan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat

informasi tentang program, kegiatan, serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses review tersebut sangat penting untuk dilakukan agar terjadi konsistensi dan sinkronisasi terhadap tujuan, sasaran seperti yang telah diuraikan diatas. Namun, untuk perbandingan dengan dokumen rancangan awal RKPD tidak dilakukan karena dokumen rancangan awal RKPD dalam tahap penyusunan.

Pada rancangan Awal RKPD Tahun 2022 pagu indikatif berdasarkan kebutuhan sekitar Rp..... Milyar. Hal ini dikarenakan pagu indikatif pada tahun sebelumnya tidak memenuhi urusan teknis dinas sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu urusan kewenangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil sehingga belum maksimal berjalan sebagaimana seharusnya.

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023
PROVINSI MALUKU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROG/KEG/SUB KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	TOTAL PAGU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				16.245.391.306 15.955.391.306	TOTAL PAGU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				11.561.005.661 8.554.073.586	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.062.140.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				303.187.500	
01	Penyusunan Rencana Strategis dan Renja Perangkat Daerah		Dokumen Rencana Strategis dan Renja Dinas yang Disusun	2 dokumen	202.428.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkatan Daerah		Dokumen Rencana Strategis dan Renja Dinas yang disusun	2 dokumen	16.951.100	
02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	9 dokumen	202.428.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen Anggaran (RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	6 Dokumen	47.481.600	

03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP,LPPD,L KPj, Laporan Tahunan)	4 dokumen	202.428.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan (Forum Perangkat Daerah/Dukcapil)	1 kali	143.119.000	
04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan (forum perangkat daerah, forum Dukcapil)	2 kali	202.428.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP, LPPD, LKPj, Laporan Tahunan) Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan 4 laporan	95.635.800	
05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan	4 dokumen	252.428.000						
	Administrasi Keuangan				6.512.251.306	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.254.708.611	
06	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN Dukcapil yang dibayarkan 1 tahun	50 orang	6.007.391.306	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN Dukcapil yang dibayarkan 1 tahun	50 orang	4.749.472.661	
07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	13 laporan	202.428.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jasa Administrasi keuangan (Pengelola keuangan, Pengelola barang milik daerah/aset, Honor PBJ)	12 Bulan	362.323.850	
08	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	202.428.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD		Laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	79.680.100	
09	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		Laporan Aset Semesteran	2 dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Bulanan dan Semester	13 Laporan	63.232.000	

	Administrasi Umum				8.172.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				88.939.925
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	7.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jasa Jaminan Milik Daerah	2 jenis	41.300.000
								Kendaraan Dinas	6 unit	
								Rumah Jabatan	1 tahun	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		Kebutuhan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi,	12 bulan	311.600.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 12 pada SKPD		Laporan Aset	2 Dokumen	45.437.925
			Kebutuhan Pembayaran Listrik, Air, dan Telekomunikasi	12 bulan						
12	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Tersedianya jasa kesehatan jasmani, jasa kesehatan rohani, rohaniawan, dan dukungan penerapan new normal	12 bulan	30.240.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tertatanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.202.000
13	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Gedung Kendaraan dinas Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	1 unit 6 unit 12 bulan	300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.960.200
14	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jasa administrasi keuangan (pengelola keuangan, pengelola barang milik daerah/aset/tim pengadaan, pengelolaan sistem informasi,	12 bulan	200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	60 stel	45.000.000

			petugas PPHPK)							
15	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jasa Kebersihan Jasa Pengamanan Jasa Sopir Terpenuhinya jasa kebersihan, sopir, dan pengaman kantor	5 orang 6 orang 5 orang 12 bulan	538.192.368	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		ASN Dinas Dukcapil yang mengikuti Bimtek	21 orang	55.960.200
16	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat tulis yang disediakan	12 bulan	90.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.186.804.250
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	90.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	12 bulan	19.538.000
18	Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Gedung Kantor		Komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Akses Point Wireless Alat Bantu Sosialisasi APAR Bracket dan struktur Dispenser Honor Pokja Karpas Laptop Mesin Penghancur Kertas Mic Conference Monitor touch screen PC All in One Proyektor Scanner Sound system Tangga lipat telescopic Tersedianya komputer dan	3 unit 1 set 1 unit 5 set 5 unit 5 OP 100 meter 1 unit 6 unit 1 set 1 set 1 unit 1 1 unit 1 set 1 set 7 jenis	638.292.050

								jaringan komputerisasi Tong sampah 3 warna Tong Sampah dorong fiberglass UPS Vacuum cleaner Video controler Video Spliter Wall Display (TV LED) 46 inch	2 unit 3 unit 15 unit 1 unit 1 set 1 unit 9 unit		
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		bahan logistik kantor yang disediakan Makanan dan Minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu	12 bulan 12 bulan	113.184.000	
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	47.738.250	
21	Pemyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makan dan minum rapat	12 bulan	62.106.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	15.000.000	
22	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah	12 bulan	1.772.561.632	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	353.051.950	
23	Pengadaan Meubeler		Kursi eselon 2 Kursi hadap eselon 4 Meja dan Kursi	1 unit 11 unit 1 set	93.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				72.115.850	

			putar Meja eselon 2 Meja makan minum Rak buku kayu Sofa Tersedianya meubeler	1 unit 1 set 2 unit 1 set 7 jenis					
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Akses point wireless Alat bantu sosialisasi APAR Bracket dan struktur Dispenser Honor pokja Karpas Laptop Mesin penghancur kertas Mic Conference Monitor Touch Screen PC All in One Proyektor Scanner Sound System Tangga lipat telescopic Tersedianya komputer dan Jaringan komputerisasi Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tong sampah 3 warna Tong sampah	3 unit 1 set 1 unit 5 set 5 unit 5 op 100 meter 1 unit 6 unit 1 set 1 set 1 unit 1 set 1 unit 1 set 1 set 7 jenis 16 jenis 2 unit	651.350.000	Pengadaan Mebel	Kursi eselon II Kursi Hadap eselon IV Meja dan Kusi Putar Meja eselon II Meja makan minum Rak Buku Kayu Sofa	1 unit 11 unit 1 set 1 unit 1 set 2 unit 1 set	72.115.850

			dorong fiber glass UPS Vacum Cleaner Video Controller Video Spliter Wall Display (TV LED) 46 inc	3 unit 15 unit 1 set 1 set 1 unit 9 unit						
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	1 unit	30.000.000	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				915.387.250
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jarkomdat Komputer Laptop Peralatan gedung kantor yang terpelihara Printer Server Videotron	1 unit 19 unit 26 unit 12 bulan 19 unit 3 unit 1 unit	106.850.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	350 surat		3.997.950
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	3 jenis 8 jenis	100.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Air Internet Kebutuhan Jasa Informasi dan Dokumentasi Listrik Rekening tagihan yang dibayarkan Telepon	300 meter kubik 80 Mbps 12 bulan 8500 KWH 12 bulan 1 rekening		337.995.800

28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	6 unit	178.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa Kebersihan Jasa kebersihan, sopir dan pengaman kantor Jasa Kesehatan Jasmani Jasa Pengaman Jasa Sopir	5 orang 12 Bulan 12 Bulan 6 orang 4 orang	573.393.500	
29	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	1 unit	3.764.400.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				631.970.000	
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	1 unit	41.190.000	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				209.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	5 unit	194.930.000	
31	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 stel	111.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Gedung kantor yang dipelihara Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rumah jabatan yang dipelihara	1unit 1 unit 1 unit	266.900.000	
32	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		ASN yang mengikuti bimtek	15 orang	98.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Instalasi dan Jaringan yang dipelihara (Listrik, Telp/Internet, Air)	3 jenis	128.950.000	

							Peralatan/perengkapan gedung kantor yang dipelihara	13 jenis		
									90.040.000	
							PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
							Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			90.040.000
							Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Peserta Rapat Teknis	40 orang	12.768.500
							Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah OPD yang mengikuti Rapat Koordinasi Pemanfaatan GDPK	35 OPD	20.275.950
							Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Kab/Kota yang teradvokasi	7 Kab/Kota	47.426.550

						Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta sosialisasi	40 orang	9.569.000	
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			75.960.000	
						Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			29.000.000	
						Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Sosialisasi dan Pelaksanaan peringatan Hari Keluarga Nasional ke XXVIII Tingkat Provinsi	1 kali	29.000.000	
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan			46.960.000	

					Kesertaan Ber-KB				
					Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK		Jumlah koordinasi, pembinaan dan penilaian pelaksana terbaik Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan ke Kab/Kota	19 Kabupaten/Kota	46.960.000
							Jumlah pelaksana terbaik kategori Kesrak PKK Bangga Kencana	10 Kab/Kota	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				108.950.000
					Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				57.880.000
					Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah ASN Pemprov Sumbar terpilih sebagai ASN Model Program KKBPK (Duta ASIK)	9 orang	41.181.000
					Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)		Jumlah Pengelola dan Pelaksana PIK-R yang mengikuti workshop	38 orang	16.699.000

						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				51.070.000	
						Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Baliat (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah FGD pengelolaan program ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, BKL, dan UPPKS	1 kali		30.000.000	
							Jumlah orientasi Lapangan pengelolaan program ketahanan keluarga	4 ormas/orsos			
						Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah fasilitasi pengembangan prgram di Kampung KB	19 Kabupaten/Kota		21.070.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				51.000.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.104.374.575	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				51.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				162.935.100	
	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi		Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran	19 Kabupaten/ Kota	17.000.000	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional				66.136.000	

			penduduk							
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi		Tersajinya data penduduk non permanen dan penduduk rentan	19 Kabupaten/Kota	17.000.000	- Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk (Buku Putih)		Jumlah Rakor Pencapaian TargetPerekaman dan Kepemilikan KTP-el yang dilaksanakan	2 kali	41.136.000
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional		Terbitnya kebijakan teknis pendaftaran penduduk	19 Kabupaten/Kota	17.000.000	- Rapat Koordinasi Pencapaian Target Perekaman dan Kepemilikan KTP-el (DAK)		Terbitnya Kebijakan Tenis Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	25.000.000
						Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi		Tersedianya data penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan	19 Kabupaten/Kota	31.846.000
						Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi		Tertatanya standar operasional pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan peraturan yang berlaku	19 Kabupaten/Kota	31.074.100
						Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk		Terpantau dan Terkendalinya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	19 Kabupaten/Kota	33.879.000
						Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				516.245.500
						Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk				466.995.100

					- Pekan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terfasilitasinya pendistribusian pendistribusian blangko KTP-el kab/kota	19 Kabupaten/Kota	179.240.900
					- Pendistribusian Blangko KTP-el (DAK)	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan adminduk	12 bulan	60.000.000
					- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pekan pelayanan pendaftaran penduduk	4 kali	227.754.200
					Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk			49.250.400
					- Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi kebijakan adminduk yang dilaksanakan	1 kali	20.860.000
					- Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk (DAK)	Jumlah workshop Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	1 kali	28.390.400
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			425.193.975
					Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk			200.193.975
					- Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran penduduk	19 Kabupaten/Kota	29.064.435

						- Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan Hasil Monev Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk	1 dokumen	121.129.540	
						- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ke Kabupaten/Kota (DAK)	Terpilihnya Dinas Kabupaten/Kota Terbaik	5 kabupaten/kota	50.000.000	
						Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk			225.000.000	
						- Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Front Office) (DAK)	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek front office	57 orang	75.000.000	
						- Bimbingan Teknis Pengarsipan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek pengarsipan	38 orang	50.000.000	
						- Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek daftduk	38 orang	50.000.000	
						- Bimbingan Teknis Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk (DAK)	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek bina aparatur	50 orang	50.000.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				17.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			576.994.600	
	Pelayanan Pencatatan Sipil				17.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil			240.244.200	

	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting		Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemanfaatan data peristiwa penting	19 Kabupaten/ Kota	17.000.000	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil		Jumlah Rakor Pencapaian Target Perekaman dan Kepemilikan KTP-el yang dilaksanakan Terbitnya Kebijakan Teknis Pendaftaran Penduduk	2 kali 1 dokumen	25.000.000	
						Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting		Terlaksananya Pemanfaatan Data Peristiwa Penting	19 Kabupaten/ Kota	53.562.000	
						Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil				161.682.200	
						- <i>Pembahasan Penggunaan DAK (DAK)</i>		<i>Asistensi penyusunan RKA DAK non fisik Kab/Kota</i>	<i>1 kali</i>	<i>60.000.000</i>	
						- <i>Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>		<i>Laporan Penyelenggaraan pencatatan sipil kab/kota</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>41.682.200</i>	
						- <i>Monitoring dan Evaluasi DAK (DAK)</i>		<i>Laporan pelaksanaan realisasi DAK kab/kota dan Provinsi</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>60.000.000</i>	
						Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tingkat Provinsi				149.250.400	

						Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil		Tersedianya pedoman pelaksanaan administrasi pencatatan sipi; yang disepakati kab/kota	1 dokumen	50.000.000	
						Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				49.250.400	
						- <i>Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>		<i>Jumlah peserta workshop</i>	<i>25 orang</i>	<i>20.860.000</i>	
						- <i>Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (DAK)</i>		<i>Jumlah peserta sosialisasi</i>	<i>50 orang</i>	<i>28.390.400</i>	
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil		Teredukasinya pemangku kepentingan dan masyarakat terkait stunting	1 kali	50.000.000	
								Tersedianya informasi terkait stunting	1 dokumen		
						Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				187.500.000	
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil				87.500.000	
						- <i>Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ke Kabupaten/Kota (DAK)</i>		<i>Tersedianya laporan evaluasi terkait pencatatan sipil kab/kota</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>50.000.000</i>	

						- Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil		Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan administrasi pencatatan sipil	19 Kabupaten/Kota	37.500.000	
						Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil				100.000.000	
						- Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil (DAK)		Jumlah peserta bimtek capil	38 orang	50.000.000	
						- Bimbingan Teknis Bina Aparatur Pencatatan Sipil		Jumlah peserta bimtek bina aparat capil	50 orang	50.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				188.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				785.434.900	
	Penataan Administrasi Kependudukan				34.000.000	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				56.000.000	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi		Jumlah dokumen SOP terkait pemantauan, evaluasi dan pengendalian PIAK dan Pemanfaatan Data	4 dokumen	17.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen SOP terkait pemantauan, evaluasi dan pengendalian PIAK dan Pemanfaatan Data	4 dokumen	28.000.000	

	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pedoman pengolahan dan penyajian data kependudukan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 dokumen	17.000.000	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat, dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengolahan dan penyajian data kependudukan tingkat Provinsi dan Kab/Kota	1 dokumen	28.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi				69.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				437.634.900	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Laporan hasil pemantauan dan pengendalian kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	1 dokumen	17.000.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				175.000.000	
	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan data kependudukan tingkat provinsi	1 kali	17.000.000	- <i>Pengelolaan SLAK</i>		<i>Jumlah sarana dan prasarana ruang server</i>	<i>3 unit</i>	<i>150.000.000</i>	
								<i>Terfasilitasinya validasi data Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan</i>	<i>2 kali</i>		
								<i>Terkelolanya Jarkomdat</i>	<i>12 bulan</i>		
								<i>Tersedianya jasa Administrator Jaringan dan Programmer</i>	<i>1 orang</i>		

	Koordinasi Berkala Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi		Terlaksananya rakor penyelenggaraan adminduk	4 kali	18.000.000	- Rapat Koordinasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (DAK)		Terlaksananya Rakor Pengolahan dan Penyajian Data	1 kali	25.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		Jumlah sarana dan prasarana ruang server	3 unit	17.000.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				57.000.000	
			Terfasilitasinya validasi data SIAK	2 kali							
			Terkelolanya jarkomdat di Kab/Kota	12 bulan							
			Terlaksananya pekan pelayanan pendaftaran penduduk dan sumbar expo	1 kali							
			Tersedianya jasa administrasi jaringan dan programer	1 orang							
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan				85.000.000	- Sosialisasi terkait Pemanfaatan Data		Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan tingkat provinsi	1 kali	39.000.000	
	Supervisi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Provinsi		Tersupervisinya inonvasi pengolahan dan penyajian data kependudukan sesuai aturan	19 Kabupaten/ Kota	17.000.000	- Publikasi Media Cetak dan Elektronik (DAK)		Publikasi informasi terkait adminduk	6 kali	18.000.000	

	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Urusan Administrasi Kependudukan		Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelaksanaan administrasi pencatatan sipil	19 Kabupaten/ Kota	17.000.000	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi				91.634.900	
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		Laporan hasil pemantauan database	1 laporan	17.000.000	- Rapat koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Forum Dukcapil)		Jumlah Rakor Penyelenggaraan Adminduk	4 kali	91.634.900	
	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		Terpilihnya dinas Kabupaten/Kota terbaik	5 Kabupaten/ Kota	17.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				114.000.000	
	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Terlaksananya bimtek pencatatan sipil	1 kali	17.000.000	- Pemantauan dan Pengendalian Kerjasama Pemanfaatan Data		Laporan hasil pemantauan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan data	1 dokumen	53.000.000	
			Terlaksananya bimtek pendaftaran penduduk	1 kali							
			Terlaksananya bimtek PIAK dan pemanfaatan data	1 kali							
						- Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi (DAK)		Jumlah OPD yang telah melakukan Pemanfaatan Data	12 OPD	61.000.000	
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				291.800.000	

						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				191.800.000	
						- <i>Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data</i>		<i>Tersupervisinya inovasi pengolahan dan penyajian data kependudukan sesuai aturan</i>	<i>19 Kabupaten/Kota</i>	<i>29.590.000</i>	
						- <i>Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan</i>		<i>Laporan hasil pemantauan pemeliharaan database kependudukan</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>52.210.000</i>	
						- <i>Pemantauan Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)</i>		<i>Laporan hasil pemantauan aplikasi pelayanan adminduk</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>85.000.000</i>	
						- <i>Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go Digital (DAK)</i>		<i>Jumlah peserta rakor</i>	<i>25 orang</i>	<i>25.000.000</i>	
						Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				100.000.000	
						- <i>Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)</i>		<i>Terlaksananya Bimtek PIAK</i>	<i>19 Kabupaten/Kota</i>	<i>50.000.000</i>	

						- Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (DAK)		Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	19 Kabupaten/Kota	50.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				34.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				265.178.000	
	Penyediaan Pprofil Kependudukan				34.000.000	Penyediaan Profil Kependudukan				265.178.000	
	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi		Jumlah buku data kependudukan persemester Jumlah rapat pembahasan dengan Kab/Kota	2 buku data (200 buku) 2 kali	17.000.000	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi		Jumlah buku data kependudukan persemeste Jumlah rapat pembahasan dengan Kab/Kota	2 buku data (200 buku) 2 kali	90.000.000	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Jumlah profil kependudukan tingkat provinsi yang disusun Jumlah rapat pembahasan dengan Kab/Kota dan OPD/Instansi teknis yang dilaksanakan Terlaksananya rapat teknis evaluasi hasil Tersupervisinya profil kependudukan Kab/Kota	1 profil (100 buku) 3 kali 1 kali 19 Kabupaten/Kota	17.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				175.178.000	

						- Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan	60 orang	61.000.000	
						- Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan	Tersupervisinya profil kependudukan Kab/Kota	19 Kabupaten/Kota	30.178.000	
						- Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi	Jumlah rapat pembahasan dengan Kab/Kota dan OPD/instansi teknis yang dilaksanakan Jumlah profil kependudukan tingkat provinsi yang disusun	3 kali 1 profil (100 buku)	84.000.000	

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJMD adalah Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Selanjutnya penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku mempedomani Program, Kegiatan Pemerintah Pusat, sehingga tidak ada program/kegiatan/sub kegiatan yang harus diusulkan masyarakat.

TABEL T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
PROVINSI MALUKU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

BAB III

Tujuan dan Sasaran OPD

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)

Dengan arah kebijakan fokus pada :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
2. Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah.
3. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
4. Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *datacenter* SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

B. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2021-2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, salah satu lembaga Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku yang merupakan unsur pendukung tugas pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertanggung jawab dalam pelaksanaan misi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan misi di atas antara lain meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kab/Kota se Maluku melalui bimbingan, supervisi dan konsultasi, Meningkatnya kualitas penyajian dan pemanfaatan data kependudukan Prov/Kab/Kota melalui koordinasi.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Visi dan Misi RPJMD Provinsi Maluku 2021-2026, yang berkaitan langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku Tahun 2021-2026 adalah:

“Maluku Yang Yerkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan” Dengan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah pada Misi :

1. **“Mewujudkan birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih, dan Melayani”**
2. **“Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Murah dan Terjangkau**
3. **“Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”**
4. **“Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau”**
5. **“Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata “**
6. **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan Berprestasi”**

Dengan tujuan Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani.

Sebagai implementasi dari Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku tahun 2019-2024, dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi Maluku mempunyai tujuan, sasaran yang dituangkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Tujuan

1.1 Mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan daerah

1.1.1 Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan

1.2 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan melayani

1.2.1 Persentase kepemilikan dokumen kependudukan

2. Sasaran

2.1 Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi

2.1.1 Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan

2.2 Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap

2.2.1 Persentase kepemilikan dokumen kependudukan

3. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan antara lain, meliputi:

3.1 *Jumlah Program dan Kegiatan*

Untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur dalam RPJMD 2019 -2024 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 2019-2024, maka dalam tahun anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku merencanakan 8 Program, 23 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan.

3.2 *Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan*

Rencana Lokasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2024 tersebar pada semua Kab/Kota di Provinsi Maluku

3.3 *Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif*

Rencana kebutuhan Anggaran untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2024 sebesar Rp. 12.546.346.386,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan implementasi dari kebijaksanaan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku yang telah dirumuskan di atas. Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Maluku sesuai kewenangan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutakhirkan dengan keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berdasarkan hal di atas, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR**

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI**

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Meubeler
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Meubeler
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pendataan Penduduk Non Parmenen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Pencatatan Sipil

Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting

Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi

Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil

Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan Provinsi

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan

Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pendayagunaan Data Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Penyediaan Profil Kependudukan

Penyediaan Data Kependudukan Provinsi

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta

Kebutuhan Lainnya

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Provinsi dan Kab/Kota

Advokasi dan Sosialisasi GDPK

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi

Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

(IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan

Koordinasi, Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan berbasis Keluarga

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi,

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Lokal

Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal

Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui Mitra Kerja

Penguatan Kerjasama dengan Stakholder dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan

Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK

Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan

Reproduksi dan Hak – Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal

Pembinaan, Promosi dan Konseling Reproduksi

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan

tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan

Kesertaan ber-KB

Peningkatan Peran Serta dan Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan dalam

Pelayanan dan Pembinaan kesertaan ber-KB

Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK

**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA (KS)**

**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sosialisasi dan Pembinaan bagi Remaja tentang Generasi Berencana PIK-R

Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangn dan Penguatan Penyiapan

Pengasuhan 1000 HPK

**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan ber-KB**

Sosialisasi dan Promosi tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan
Keuangan Keluarga

Berdasarkan hal di atas untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mewujudkan tujuan dan sasaran daerah. Rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Administrasi Kependudukan Tahun 2024 adalah :

NO.	NAMA PROGRAM	JUMLAH DANA (Rp.)	KET.
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.420.099.236	8 kegiatan/40 Sub Kegiatan
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	841.247.150	3 kegiatan/5 Sub Kegiatan
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	1.700.000.000	3 kegiatan/6 Sub Kegiatan
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	475.000.000	2 kegiatan/4 Sub Kegiatan
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	125.000.000	1 kegiatan/2 Sub Kegiatan
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	825.000.000	2 kegiatan /4 Sub Kegiatan
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	460.000.000	2 kegiatan/5 Sub Kegiatan
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	700.000.000	2 kegiatan/4 Sub Kegiatan
JUMLAH		10.561.346.386	23 kegiatan/72 Sub Kelgiatan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI MALUKU

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE					PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
									TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					12.546.346.386				13.205.453.432
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					10.561.346.386				11.121.203.342
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE KETERCAPIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen		100	7.420.099.236			100	7.791.606.925
2	12	1	1.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					70.010.746				73.511.963
2	12	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Renstra, Renja)	Dokumen	Provinsi	2	46.951.065	APBD		2	49.299.300
2	12	1	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Dokumen	Provinsi	1	5.249.685	APBD		1	5.512.169

2	12	1	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Dokumen	Provinsi	2	4.199.895	APBD		2	4.409.889
2	12	1	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	Provinsi	1	4.158.788	APBD		1	4.366.727
2	12	1	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dokumen	Provinsi	2	4.200.263	APBD		2	4.410.276
2	12	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun (LAKIP, LPPD, LKPJ)	Dokumen	Provinsi	4	5.251.050	APBD		4	5.513.602
2	12	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.449.765.335				4.672.253.600
2	12	1	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	Provinsi	29	4.357.611.235	APBD		29	4.575.491.796
2	12	1	1.02	03	Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	Provinsi	1	55.944.000				58.741.200
2	12	1	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	Provinsi	1	10.288.950	APBD		1	10.803.397
2	12	1	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	Provinsi	1	15.921.150				16.717.207
2	12	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	dokumen	Provinsi	13	5.000.000	APBD		13	5.250.000
2	12	1	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	Provinsi		5.000.000				5.250.000
2	12	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					40.000.000				42.000.000

2	12	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen		4	5.000.000	APBD		4	5.250.000
2	12	1	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen		2	15.000.000	APBD		2	15.750.000
2	12	1	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Dokumen		1	20.000.000	APBD		1	21.000.000
2	12	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					201.500.000				211.575.000
2	12	1	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket		43	21.500.000	APBD		110	22.575.000
2	12	1	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	[1] Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola ; [2] Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (Anjab ABK, Peta Jabatan, Informasi Jabatan, Evaluasi Jabatan, Rencana Kebutuhan Pegawai dll)	dokumen		6	15.000.000	APBD		6	15.750.000
2	12	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	[1] Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (SPIP); [2] Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	orang		32	65.000.000	APBD		32	68.250.000
2	12	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan	Orang		1	50.000.000	APBD		1	52.500.000

2	12	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	[1] Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi; [2] Jumlah bimtek yang dilaksanakan	Orang		10	50.000.000	APBD		15	52.500.000
2	12	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					463.447.155				486.619.512
2	12	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket		200	44.482.830	APBD		200	46.706.971
2	12	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket		12	14.288.925	APBD		12	15.003.371
2	12	1	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Paket		12	5.000.000	APBD		12	5.250.000
2	12	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	Orang			21.000.000	APBD		285	22.050.000
2	12	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen		12	338.675.400	APBD		12	355.609.170
2	12	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	Dokumen		12	15.000.000	APBD		12	15.750.000
2	12	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan	Orang		1	25.000.000	APBD		1	26.250.000
2	12	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.000.000.000				1.050.000.000
2	12	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	unit		3	350.000.000	APBD		1	367.500.000
2	12	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	unit		20	150.000.000	APBD		6	157.500.000
2	12	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	unit		20	250.000.000	APBD		3	262.500.000
2	12	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	unit		20	250.000.000	APBD			262.500.000

2	12	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					558.256.000				586.669.800
2	12	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat		500	6.500.000	APBD		500	6.825.000
2	12	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Tagihan dibayarkan [1] Air ; [2] Listrik ;[3] Telp;[4] Internet	[1] M ³ ; [2] KWH; [3] rekening		[1] 300 ; [2] 8500 ; [3] 1	142.380.000	APBD		[1] 300 ; [2] 8500 ; [3] 1	150.000.000
2	12	1	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia : [1] Jasa Kebersihan, [2] Jasa Sopir, [3]Jasa Administrasi	Orang		[1] 1; [2] 2; [3] 9;	409.376.000	APBD		[1] 1; [2] 2; [3] 9;	429.844.800
2	12	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					637.120.000				668.977.050
2	12	1	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	unit		1	41.190.000	APBD		1	43.250.550
2	12	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit		5	229.000.000	APBD		9	240.450.000
2	12	1	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Unit		12	10.500.000	APBD		12	11.025.000
2	12	1	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		12	10.500.000	APBD		12	11.025.000
2	12	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Unit		1	230.000.000	APBD		1	241.500.000
2	12	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	jenis		15	115.930.000	APBD		15	121.726.500
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					841.247.150				883.127.507

2	12	2	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan									120.938.000					126.984.900
2	12	2	01.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen data penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	dokumen		11		120.938.000	APBD				1			126.984.900
2	12	2	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan									216.942.150					227.789.257
2	12	2	1.02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan		11		50.318.000	APBD				4			52.833.900
2	12	2	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan				166.624.150	APBD				1			174.955.357
2	12	2	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan									503.367.000					528.353.350
2	12	2	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dinas Laporan Kab/ Kota yang dibina terkait pendaftaran penduduk	Laporan		11		364.000.000	APBD				1			382.200.000
2	12	2	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil i Bimtek terkait pendaftaran penduduk	Laporan		1		139.367.000	APBD				1			146.335.350
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL									1.700.000.000					1.785.000.000

2	12	3	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil					450.000.000				472.500.000
2	12	3	1.01	03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan peristiwa penting	PKS		1	225.000.000	APBD		[1] - [2] 19	236.250.000
2	12	3	1.01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil diKabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan Kab/ Kota yang difasilitasi	unit		1	225.000.000	APBD		1	236.250.000
2	12	3	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi					700.000.000				735.000.000
2	12	3	1.02	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil	kali		11	275.000.000	APBD		3	288.750.000
2	12	3	1.02	02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	orang		38	425.000.000	APBD		2	446.250.000
2	12	3	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					550.000.000				577.500.000
2	12	3	01.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dinas Dukcapil Kab/ Kota yang dibina terkait Pencatatan Sipil	kab/kota		19	275.000.000	APBD		19	288.750.000
2	12	3	01.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah aparatur mengikuti Bimtek terkait Pencatatan Sipil	Orang		120	275.000.000	APBD		38	288.750.000
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					475.000.000				530.219.000
2	12	4	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya Penyelenggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	persen		100	225.000.000			100	236.250.000

2	12	4	1.02	01	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	kali		4	125.000.000	APBD		2	131.250.000
2	12	4	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	orang		38	100.000.000	APBD		3	105.000.000
2	12	4	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					250.000.000				262.500.000
2	12	4	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dinas Dukcapil Kab/ Kota yang dibina terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab/ Kota		19	150.000.000	APBD		19	157.500.000
2	12	4	1.03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek terkait PIAK dan Pendayagunaan data kependudukan	Orang		120	100.000.000	APBD		120	105.000.000
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					125.000.000				131.250.000
2	12	5	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan					125.000.000				131.250.000
2	12	5	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah buku data agregat kependudukan per semester	buku		120	25.000.000	APBD		120	26.250.000
2	12	5	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku profil kependudukan yang disusun	buku		1	100.000.000	APBD		1	105.000.000
2	12				URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					1.985.000.000				2.084.250.000

					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							825.000.000					866.250.000
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							575.000.000					603.750.000
					Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK 5 Pilar Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen		7	150.000.000	APBD						157.500.000
					Advokasi dan Sosialisasi GDPK 5 Pilar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan		7	425.000.000	APBD						446.250.000
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi					250.000.000							262.500.000
					Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen		11	175.000.000	APBD						183.750.000
					Koordinasi, Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Koordinasi, Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan berbasis Keluarga	Dokumen		1	75.000.000	APBD						78.750.000
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					460.000.000							483.000.000

				Pembinaan Promosi dan Konseling Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Reproduksi	Laporan		7	35.000.000				36.750.000
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat tingkat Daerah Provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB					100.000.000				105.000.000
				Peningkatan Peran serta dan kerja sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta dan kerja sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Organisasi		4	50.000.000				52.500.000
				Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kmitraan dalam Program KKBPK	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kmitraan dalam Program KKBPK	Organisasi		4	50.000.000				52.500.000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					700.000.000				735.000.000
				Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					400.000.000				420.000.000
				Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen		4	75.000.000	APBD			78.750.000
				Sosialisasi dan Pembinaan bagi Remaja tentang Generasi Berencana, PIK-R	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan bagi Remaja tentang Generasi Berencana, PIK-R	Orang		4	175.000.000	APBD			183.750.000
				Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan,	Dokumen		WUS	150.000.000	APBD			157.500.000

					Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Peengasuhan 1000HPK								
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan ber-KB					300.000.000			315.000.000
					Sosialisasi dan Promosi tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan keuangan Keluarga	Dokumen		UPKKS	300.000.000	APBD		315.000.000

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku adalah Program Tahunan Dinas Dukcapil Provinsi Maluku yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Dukcapil Provinsi Maluku. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya:

1. Dukungan anggaran yang dilimpahkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terbatas;
2. Tidak dianggarkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Adminduk oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan dari pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik.
4. Belum adanya kesadaran OPD lingkup provinsi untuk melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kewenangan sebagai OPD Provinsi yang telah sesuai dengan Undang- undang nomor 23 Tahun 2014.

Ambon, Maret 2023

P.T.T. KEPALA DINAS

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

Dra. Dewi Andayani Pattimahu

Pembina Tk.I

011 419651 427 199203 2 004

